

BAB V

KESIMPULAN

Dengan adanya RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, Prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi misi dari Walikota Padang RPJMD diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih berkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya RKPD ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a) RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya yang baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang berupa stimulant untuk mendorong partisipasi masyarakat serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.
- b) Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat melibatkan segala unsur didalamnya dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksana dan pengawasan sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah berjalan seperti yang diharapkan dan bisa memenuhi kebutuhan Provinsi Sumatera Barat.

- c) RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
- d) Untuk pelaksanaannya sendiri pada tahun 2019 sedang dilaksanakan. Apabila ada kendala atau Rencana yang telah direncanakan tidak terlaksana, akan dilaksanakan kembali pada RKPD Perubahan.
- e) Tidak terlaksana rencana tersebut disebabkan dari segi target dan beberapa factor.

5.2 Saran

1. Belum optimalnya pelayanan public dan tata pemerintah yang baik, transparan, bersih dan bertanggungjawab.
2. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM)
3. Belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan.
4. Kurangnya ketaatan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan antisipasi penanggulangan bencana.
5. Kurangnya sarana dan prasarana perkotaan, pemukiman dan transportasi.
6. Rendahnya ketertiban masyarakat.

7. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dari prioritas masalah.
8. Kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh BAPPEDA sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
9. Kepada pegawai BAPPEDA untuk dapat meningkatkan manajemen kerja dari atasan sampai bawahan, sehingga tercipta kondisi kerja yang efektif dan efisien dengan cara meningkatkan kinerja serta kedisiplinan pegawai.
10. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas perlu dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal.
11. Dalam perumusan kegiatan-kegiatan proses penyusunan RKPD, pemerintah haruslah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, pertimbangan dan pengkajian yang mendalam perlu dilakukan terhadap semua kegiatan yang direncanakan untuk tercapainya hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

